

**PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS DALAM PENGELOLAAN
TERMINAL DURI BESTARI**

Oleh:
Yogi Hanafi
187322036

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

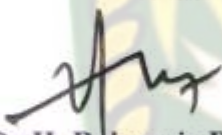
Nama : Yogi Hanafi
NPM : 187322036
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2020
Pukul : 14.00 – 15.00 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

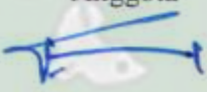
Ketua


(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Sekretaris


(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA.)

Anggota


(Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.)

Mengetahui,

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**


(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum.)

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALA PENGELOLAAN TERMINAL DURI BESTARI

Oleh :

Nama : Yogi Hanafi
NPM : 187322036
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal 15 AGST 2020

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si

Pembimbing II

Tanggal 14-08-2020

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 035/KPTS/PPs-UIR/2020

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : YOGI HANAFI

N P M : 18 732 2036

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : "PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM PENGELOLAAN TERMINAL DURI BESTARI"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 23 Januari 2020

Direktur

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

NPK. 92 11 02 199

Disampaikan Kepada :

Universitas Islam Riau

Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Hanafi
NPM : 187322036
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Yogi Hanafi



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 056/A-UJR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Yogi Hanafi
NPM : 187322036
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 15 Agustus 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM PENGELOLAAN TERMINAL DURI BESTARI by Yogi Hanafi

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 15-Aug-2020 11:19 +08
- ID: 1369756998
- Word Count: 16947

Similarity Index

15%

Similarity by Source

Internet Sources:

15%

Publications:

4%

Student Papers:

15%

sources:

- 1 2% match (Internet from 29-Dec-2019)
<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/blog-single-sidebar>
- 2 2% match (Internet from 13-Nov-2019)
<http://distan.bengkaliskab.go.id/hal-renja-distan-2017.html>
- 3 1% match (Internet from 01-Jul-2019)
<http://digilib.unila.ac.id/57306/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 4 1% match (student papers from 08-Jan-2019)
[Submitted to iGroup on 2019-01-08](#)
- 5 1% match (Internet from 01-Oct-2018)
<http://bappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/176141890695.pdf>
- 6 1% match (Internet from 16-Jul-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/4080/3/BAB%20II.pdf>
- 7 1% match (student papers from 11-Feb-2020)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2020-02-11](#)
- 8 1% match (Internet from 17-Jul-2017)
<http://bima90.blogspot.com/2010/02/organisasi-manajemen-dan-pengoprasian.html>
- 9 1% match (student papers from 21-Mar-2018)
[Submitted to Universitas International Batam on 2018-03-21](#)
- 10 1% match (Internet from 12-Jul-2020)
https://dinastph.lampungprov.go.id/uploads/Renstra_DinasKetahananPanganTPH_2019_2024.pdf

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini saya persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih kepada segenap Hamba Allah yang telah saya tuliskan berikut ini, yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan saya sampai saat ini. Saya persembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta, Abang, Kakak, Adik dan Keponakan.

Saya persembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup saya, ibunda almh dan ayahanda tercinta, kedua orang tua yang menginginkan anaknya sekolah tinggi seperti apa yang beliau inginkan dan pertama saya menepati janji dan juga permintaan almh ibunda tercinta untuk menjadi seorang Magister ini, saya persembahkan untuk Ibunda almh tercinta HJ. YARNETTY BACHTIAR dan Ayahanda KENNEDY ADAMY yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukung saya, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan. Serta Abang IBRA TEGUH, SH. NICO SUHATTA, S.Km. Kakak ANNISA DESIRA, SE. Adik GHEA SYALNEFFY dan Keponakan AZZAM ADZIQA IBRAHIM, ANNINNDYA DHUHA IBRA dan Seluruh Keluarga Besar yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : YOGI HANAFI
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : DURI, 20, SEPTEMBER, 1995
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : KENNEDY ADAMY
IBU : HJ. YARNETTY BACHTIAR (almh)
6. ALAMAT : JLN. MANDAU JAYA NO.37 DURI
7. TELEPON/HP : 0852-7199-7455
8. EMAIL : yogihannafi@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : 2007 (SDN 22 MANDAU, DURI)
SMP : 2010 (SMPN 1 MANDAU, DURI)
SMA : 2013 (SMAS 5 CENDANA DURI)
S-1 : 2018 (UNIVERSITAS ISLAM RIAU)
10. RIWAYAT PEKERJAAN :

TAHUN 2013-2016 : Perusahaan Swasta Chevron (LBD)
TAHUN 2016 - sekarang : Honorer Bagian Umum Sekda Kabupaten
Bengkalis



PEKANBARU, 11 Agustus 2020

YOGI HANAFI

**PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM PENGELOLAAN
TERMINAL DURI BESTARI**

ABSTRAK

Yogi Hanafi

Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri bestari dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari yang pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peraturan dimana Unit pelaksana Teknis (UPT) dipecah menjadi beberapa bagian, sehingga terminal Duri Bestari yang dulunya masih mengurus PKB dan Parkir kini hanya mengurus terminal dan memasukkan angkot ataupun oplet agar transit di terminal. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Kepala Dinas Perhubungan Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Pemadu Moda, Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari dalam pengelolaan terminal tersebut sudah cukup berjalan akan tetapi masih banyak kekurangan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari di Kota Duri ini. Adapun hambatan yang penulis temukan seperti contoh dalam perencanaan kebijakan awal tentang lokasi dari terminal Duri Bestari menurut beberapa pihak baik penyelenggara maupun pengguna jasa terminal menyayangkan bahwa perencanaan awal dibangun terminal itu tidak tepat sasaran dalam pemilihan lokasi sehingga banyak keluhan tentang tempat dan lokasi terminal bahkan ada sebagian pengguna jasa angkot yang tidak mengetahui lokasi terminal tersebut, dan pada komunikasi antara organisasi terdapat hambatan yaitu komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Terminal, dan juga pada partisipasi dari sopir angkot masih kurang dalam menaati peraturan terhadap redistribusi. Adapun saran penulis pada penelitian ini berupa saran kepada Dinas Perhubungan dan juga Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari harus membangun lagi komunikasi yang baik, dan UPT harus lebih aktif terhadap keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat dan juga sopir angkot.

Kata kunci: Pelaksanaan Fungsi, Pengelolaan, Terminal

IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE BENGKALIS REGIONAL GOVERNMENT RELATIONSHIP SERVICE IN THE MANAGEMENT OF DURI BESTARI TERMINALS

ABSTRACT

Yogi Hanafi

implementation of the function of the Department of Transportation in managing the Duri Bestari terminal is assisted by the Duri Bestari Terminal Technical Implementation Unit, which in 2017 the Bengkalis Regency government issued a regulation whereby the Technical Implementation Unit (UPT) was split into several parts, so that the Duri Bestari terminal was still managing the PKB. and Parking is now only managing the terminal and entering angkot or oplet so that you can transit at the terminal. This research method uses qualitative research methods as a technique for data collection and direct interviews with informants such as the Head of the Transportation Service, Head of the Road Transportation and Mode Integration Division, Head of Terminal Technical Implementation Unit and others. The results showed that the management carried out by the Bengkalis Regency Transportation Office and assisted by the Duri Bestari Terminal Technical Implementation Unit in managing the terminal has been quite running, but there are still many deficiencies in the management of the Duri Bestari terminal in Duri City. As for the obstacles that the authors found, for example in the initial policy planning regarding the location of the Duri Bestari terminal according to several parties, both the organizer and terminal service users, regretted that the initial planning for the terminal construction was not right on target in selecting the location so that there were many complaints about the location and location of the terminal even some were Angkot service users who do not know the location of the terminal, and in communication between organizations there are obstacles, namely communication between the Transportation Agency and the Terminal Technical Implementation Unit, and also the participation of angkot drivers is still lacking in obeying the regulations on levies. The author's suggestions in this study are suggestions to the Department of Transportation and the Technical Implementation Unit of Duri Bestari Terminal to rebuild good communication, and UPT must be more active with complaints that are complained of by the public and also public transportation drivers.

Key words: implementation of functions, management, terminal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari” ini penulis dan diajukan ke Pascasarjana dalam rangka memenuhi salah satu syarat Penulisan Tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah Tesis ini mungkin ditemukan banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu cara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CI selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuzza S.IP.,MA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing sets memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, khususnya Program Magister Ilmu Pemerintahan dan Pascasarjana di Universitas Islam Riau pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf/Pegawai pada Pascasarjana Universitas Islam Riau , yang telah memberikan kemudahan Administrasi yang berkaitan dengan prkuliahan.
8. Terimakasih kepada keluarga besarku dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020

Yogi Hanafi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	vi
ABSTRAK	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	x
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
 BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Batasan Masalah Penelitiann.....	12
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan	14
2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	14
2.1.2 Konsep Pemerintahan	15
2.1.3 Konsep Pemerintah	18
2.1.4 Konsep Kebijakan.....	20
2.1.5 Konsep Kebijakan Publik	23
2.1.6 Konsep Pemerintah Daerah.....	24
2.1.7 Konsep Tugas.....	25
2.1.8 Konsep Pengelolaan	27
2.1.9 Konsep Transportasi	31
2.1.10 Konsep Terminal	33
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Pemikiran	38
2.4 Konsep Operasional dan Operasional Variabel.....	39
2.4.1 Konsep Operasional	39

2.4.2 Operasional Variabel	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	42
3.2 Metode Penelitian	42
3.3 Lokasi Penelitian	43
3.4 Informan Penelitian	43
3.5 Jenis dan Sumber Data	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7 Teknik Analisis Data	47
3.8 Sistematika Penulisan	49
3.9 Jadwal Penelitian	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Profil kabupaten Bengkalis.....	51
4.1.2 Gambaran umum Kecamatan Mandau.....	54
4.1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.....	56
4.1.4 Gambaran Umum Terminal Duri Bestari.....	70
4.2 Pembahasan	71
4.2.1 Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	71
4.2.1.1 Perencanaan.....	73
4.2.1.2 Pengorganisasian	77
4.2.1.3 Pengarah.....	80
4.2.1.4 Pengawasan	84
4.2.2 Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	87
4.2.2.1 Rencana Kebijakan Awal	87
4.2.2.2 Komunikasi Antar Organisasi	89
4.2.2.3 Partisipasi Sopir Angkot dan masyarakat.....	90
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rute Trayek Angkutan Sewa Yang Sering Beroperasi Di Kecamatan Mandau.....	7
2.1Tabel Penelitian Terdahulu	36
2.2 Tabel Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari.....	40
3.1Informan Penelitian	44
3.2Jadwal Penelitian	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Rute Trayek terminal Duri Bestari	7
2.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari.....	38
3.1 Komponen Analisis Data	48
4.1 Peta Kabupaten Bengkalis	53
4.2 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan	55
4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.. ..	56
4.4 Terminal Duri Bestari.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, salah satunya adalah transportasi, guna mendorong pembangunan yang merata.

Transportasi menurut Salim¹ adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain. Ahmad Munawar dalam Kadir² mendefinisikan transportasi sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Untuk setiap bentuk transportasi terdapat unsur pokok transportasi, yaitu: jalan, kendaraan dan alat angkutan, tenaga penggerak, dan terminal. Peranan transportasi sungguh sangat

¹ Salim Abbas, Manajemen Tarnsportasi Jakarta Rajawali Press 2013 (Hal 6)

² Kadir, Abdul, 2006. Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Wahana Hijau. Vol 1No 3 Hal 121

penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman. Mobilitas penduduk dari tempat ke tempat yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya memerlukan alat transportasi. Salah satu sarana transportasi jalan adalah Terminal.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,³ Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Menurut Morlok⁴ bahwa terminal adalah titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar sistem. Keberadaan terminal dapat menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu. Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Permenhub No PM 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan⁵ memiliki tujuan yaitu menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar moda serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan. Agar sebuah terminal benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang ada didalam terminal, serta dapat

³ Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Marlok, K.E., 1995. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi. Jakarta: Erlangga Hal 65

⁵ Permenhub No PM 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan

memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat unsur penting dalam sebuah terminal penumpang yaitu adanya angkutan umum dan penumpang, tanpa keduanya terminal tidak bermakna apapun, hanya sebatas sebuah bangunan.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki terminal dan salah satunya terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perhubungan, dinas mempunyai tugas melaksanakan sejumlah usaha dan kegiatan ekonomi daerah di bidangnya dan melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembentukan di bidang Perhubungan.

Pada pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Dijelaskan bahwa membantu Perhubungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi;⁶

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;

⁶ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

- b. Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
- e. Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan tersebut, maka disusunlah struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Manajemen Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 - 3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
- d. Bidang Angkutan dan Pemasu Moda, terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 - 2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
 - 3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan.
- e. Bidang Kepelabuhan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembangunan Pelabuhan;
 - 2) Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan; dan
 - 3) Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- f. Bidang Pelayaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 - 2) Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
 - 3) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan fungsi berdasarkan pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dijelaskan bahwa, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan dan Pemadu Moda, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Pelayaran, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dari beberapa susunan organisasi Dinas Perhubungan telah jelas dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang menyelenggarakan Terminal. Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Terminal. Hal ini tertuang dalam pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menjelaskan tugas dan fungsi bidang perhubungan darat sebagai berikut:⁷

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan Terminal, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terminal dan pangkalan;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan;
- d. Melaksanakan penertiban dan pengaman di dalam terminal dan pangkalan;
- e. Melaksanakan ketatausahaan UPT Terminal;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Dinas; dan

⁷ Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Salah satu terminal yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah terminal Duri Bestari yang terletak di Kecamatan Mandau. Terminal Duri Bestari didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Mandau untuk bepergian dan memperlancar arus kendaraan di lalu lintas kota Duri karena banyak Angkutan sewa yang mengambil sewa di jalan lalu lintas yang tidak teratur sehingga mengakibatkan macet.

Adapun Rute Trayek angkutan sewa yang sering beroperasi di Kecamatan Mandau sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rute Trayek Angkutan Sewa Yang Sering Beroperasi DiKecamatan Mandau

No	Rute Trayek	Jumlah angkutan sewa
1	Sudirman (Duri) – Hangtuah	5
2	Sudirman (Duri) - Gaya Baru	5
3	Sudirman (Duri) - Kopel Lapip	2
4	Sudirman (Duri) – Kulim	5
5	Sudirman (Duri) – Sudirman (Pinggir)	8
Jumlah		25

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwasanya terdapat 5 rute trayek dengan 25 angkutan sewa yang beroperasi di Kecamatan Mandau. Dengan jumlah angkutan sewa yang banyak sehingga mangkalnya di pinggir-pinggir jalan agar pengemudi lebih senang menaikkan dan menurunkan penumpang.



Gambar 1.1 Rute Trayek Terminal Duri Bestari

Berdasarkan gambar diatas dapat di lihat bahwa garis panah yang menunjukkan rute satu jalur bagi sopir angkot yang mengemudi angkot di daerah Duri Kecamatan Mandau dimana rute ini menjelaskan bahwa angkot yang mendapatkan penumpang dari Pasar mandau yang berada di Jalan Sudirman untuk melewati terminal tersebut jika ada penumpang yang diantarkan ke Jalan Bandes barulah akan singgah ke terminal, dan jika tidak melewati Jalan Bandes tersebut maka angkot tidak akan melewati terminal. Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan terlihat bahwa jika angkot yang lewat di Terminal Duri Bestari akan singgah ke terminal jika ada petugas yang menjaga terminal tersebut dan sopir angkot harus membayar uang restribusi sekali lewat sebesar Rp 1.000 dan hal pemungutan restribusi pun masih jauh dari kata disiplin, hal ini terlihat dari pengemudi mangkalnya di tepi jalan bukan di terminal. Dan sarana prasarana di terminal masih jauh kurang dari standarnya layaknya terminal angkutan. Atau,

dalam pengertian lain, bahwa mutu layanan sistem transportasi terminal belum mampu mengakomodasi seluruh keinginan masyarakat yang perkembangannya begitu cepat sesuai dengan peningkatan keadaan sosial ekonomi dan kegiatan masyarakat.

Menurut Salim⁸ Karakteristik dan fungsi terminal

1. Terminal adalah titik awal atau akhir dari lini operasional pengangkutan. Fungsi lain terminal ialah untuk pergudangan, penumpukan bongkar muat barang-barang (muatan).
2. Adapun fungsi terminal tergantung pada jenis angkutan (moda sistem) hal mana berbeda yang satu dengan yang lain termasuk fasilitas yang tersedia, terminal bis, pelabuhan udara dan pelabuhan laut.
3. Di samping itu Terminal mempunyai fungsi untuk bongkar muat barang, transit pengangkutan, melaksanakan pengisian bahan bakar, oli, dan mengadakan perbaikan alat-alat angkutan dan terpenting ialah selaku penghubung (*link*) Intermoda transportasi (*roadway, Railway port) harbour and ship/vassel*).
4. Dari segi karakteristik konstruksi desain dan fasilitas tersedia berbeda bergantung pada moda transpor, kapasitas, operasional jenis angkutan dan *demand* terhadap jasa transportasi.
5. Untuk koordinasi di lapangan pada umumnya ada kerja sama antara pihak pemerintah dengan unit-unit usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau saat ini tidak mempunyai aktifitas sebagaimana penjelasan konsep teori oleh para ahli di atas di mana pada saat ini terminal Duri bestari lebih digunakan oleh masyarakat setempat untuk membuka lapak jualan, dan juga angkutan kota sewa atau (angkot) tidak lagi menjadikan terminal sebagai lini operasional pengangkutan penumpang, terminal Duri Bestari tidak lagi menjadi transit pengangkutan barang dan penumpang sesuai dengan fungsi terminal di atas. Dalam hal ini Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari, bila dilihat dari model prinsip

⁸ Salim Abbas, Manajemen Tarnsportasi Jakarta Rajawali Press 2013 (Hal 102)

manajemen dari *George R Terry* mengungkapkan bahwa pengelolaan atau manajemen dari terminal Duri Bestari yang dilaksanakan oleh Dinas perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari dipengaruhi oleh :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penggerak
4. Pengawasan

Bagaimana dengan perencanaan dalam proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai terlaksananya fungsi-fungsi terminal tersebut. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencarian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur organisasi. Pengarah atau yang disebut juga *actuating* “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai dalam pengelolaan terminal Duri Bestari. Selanjutnya adalah pengawasan adalah kelanjutan dari perencanaan pengorganisasian pengarah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai dengan rencana awal dari program tersebut. Dengan penjelasan konsep dari manajemen menurut *George R Terry* di atas maka dari itu penulis berniat meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Salah satu terminal yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah terminal Duri Bestari yang terletak di Kecamatan Mandau. Terminal ini mengalami masa kejayaan pada saat wilayah Kecamatan Mandau masih belum dimekarkan yang sebagian dari Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Bathin Solapan pada saat itu Kecamatan Mandau adalah Kecamatan yang sangat luas, tetapi setelah sebagian wilayah dimekarkan menjadi Kabupaten baru dan Kecamatan baru, terminal Duri Bestari kini yang beroperasi hanyalah Angkutan Sewa untuk dalam Kota Duri yang bertujuan mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun sekarang dari observasi lapangan yang peneliti lakukan Angkutan Sewa (angkot) ini tidak lagi singgah ke terminal atau mangkal di terminal Duri Bestari tersebut sehingga yang terjadi adalah pengemudi Angkutan Sewa tersebut lebih memilih mangkal di pinggir jalan sehingga hal ini mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di Kota Duri.
2. Menurut observasi awal penulis bahwa lokasi keberadaan terminal yang tidak strategis sehingga sopir angkot atau oplet yang ada di Kecamatan Mandau kurang berpartisipasi untuk transit di terminal Duri Bestari ini. Dan belum adanya jadwal pengaturan keberangkatan angkutan sewa, sehingga menyebabkan pihak pengemudi masih mencari penumpang di jalan. Sehingga tidak ditegakkannya pemberian sanksi kepada pemilik

angkutan, yang melakukan pelanggaran. Sehingga pengemudi angkutan sewa sering melakukan pelanggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini ada tiga yaitu kegunaan dari aspek teoritis, aspek akademis dan aspek diri yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis

1. Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan terkhusus lagi ilmu yang berkaitan dengan manajemen transportasi
2. Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian bidang kajian ilmu pemerintahan, khususnya kajian manajemen transportasi

b. Aspek Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan roda pemerintahan.
2. Sebagai referensi bagi lembaga-lembaga akademik dan masyarakat Kecamatan Mandau dalam keberlangsungan terminal Duri Bestari.

c. Aspek Diri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti terutama ilmu pengetahuan dibidang kajian ilmu pemerintahan.

1.5 Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis hanya membatasi yang berkaitan dengan

Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari. Terminal Duri Bestari ini dipilih agar dapat aktif kembali untuk kemajuan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari”



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun untuk menjawab permasalahan penelitian. Penulis akan mengawali beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Musanef⁹ ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki bagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasiaan kedalam hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah kedalam dan keluar,
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihidari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efisiensi dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Brasz mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

⁹ Musanef dalam Syafii, Inu Kencana, 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung. Hal 32-33

Selanjutnya Ilmu pemerintahan menurut poelje¹⁰ ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Afan¹¹ Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otooitaf nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Musanef¹² Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada negara . Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

2.1.2 Konsep Pemerintahan

Rauf Rahyunir¹³ pemerintahan adalah suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat

¹⁰ Poedjo dalam Syafiie Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Reka Cipta, Jakarta. Hal 2009: 21

¹¹ Afan dalam Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka: Jakarta Hal 17

¹² Op Cit Syafiie Inu Kencana.. Hal 11

¹³ Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Zanafa Publishing; Pekanbaru. Hal 6

kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Munaf, Yusri¹⁴ pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie¹⁵ pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha¹⁶ pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

¹⁴ Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Marpoyan tujuh publishing; Pekanbaru. Hal 47

¹⁵ OpCit Syafiie 2007 Hal 4

¹⁶ Ndraha, Taliziduhu, 2010, kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Rineka Cipta, Jakarta. Hal 6

Sedangkan menurut Santos tugas-tugas Pemerintahan antara lain:

a. Melaksanakan Pembangunan

Masalah pembangunan sesungguhnya dibagi kedalam dua bagian besar yaitu masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan yang pada hakikatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan, manajemen pemerintah.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan yang menunjukan tugas-tugas pemerintah termasuk memelihara ketertipan dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

c. Pemberian Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka diperlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proposional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut Nurman¹⁷ Pemerintahan adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara.

¹⁷ Nurman. 2017. Strategi Pembangunan Daerah. Rajawali Pers; Depok Hal 55

Sementara itu, menurut Awang dan Wijaya¹⁸ istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis sedangkan tugas bersifat dinamis.

Sedangkan menurut Mustafa¹⁹ Pemerintahan adalah proses penyediaan (*providing*) produk itu kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan Pemerintah adalah organ yang dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.

Pemerintahan menurut Strong dalam Pamudji, yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).²⁰

2.1.3 Konsep Pemerintah

Sedangkan menurut Ndraha²¹ pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan.

Kemudian menurut Syafiie²² pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal

¹⁸ Awang, Azam. Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau; Pekanbaru. Hal 6

¹⁹ Mustafa, Delli. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta; Bandung Hal 98

²⁰ Pamudji, 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

²¹ Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta; Jakarta Hal 6

pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam pemerintah terdapat fungsi-fungsi pemerintah tersebut adalah, Pelayanan yang mana dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan adalah suatu perilaku atau cara melayani dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Dan juga pelayanan sifatnya dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi, dan pelayanan itu kenyataannya terdiri atas tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tidak sosial, produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama. Kemudian fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai proses pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan

²² Op Cit Syafiie, Hal 4.

sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pembangunan suatu yang, dari, oleh, untuk masyarakat, sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat, dan juga pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus dimasukan untuk benar-benar memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia dan (masyarakatnya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

- b. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah Soewargono dan Djohan²³ menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan”. Mengingat semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerintah karena yang di atur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

2.1.4 Konsep Kebijakan

Secara pemikiran praktis, kebijakan (*policy*) adalah perintah atasan. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak

²³ Soewargono dan Djohan Dalam Muhadam, Labolo, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hal 37

sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitaukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndraha mengatakan dalam bukunya *kybernology* (Ilmu Pemerintahan baru)²⁴ bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa “*policy*” adalah “*a course of action*”. Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson²⁵ “*policy is a pattern of collective action*”.

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam²⁶ berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

²⁴ Op Cit Ndraha hal 491.

²⁵ Ibid

²⁶ A.G.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 13

3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung kootasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang ada diterima oleh *public*, dan bukan atas asal menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap

yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku untuk umum dan untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, maka penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan :*what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

2.1.5 Konsep Kebijakan Publik

Dunn²⁷ kebijakan publik (*public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut Prewitt²⁸ sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (*repitisi*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye²⁹ kebijakan publik adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

²⁷ Op Cit Dunn, Hal 132

²⁸ Prewitt dalam Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 6

²⁹ Ibid hal 7

Kemudian menurut Indiahono³⁰ kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang di hadapi. Kebijakan public diarahkan untuk memecahkan permasalahan public dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.

2.1.6 Konsep Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan hal itu peran Pemerintah Daerah adalah segala sesua yang dilakukan dalam bentuk cara melaksanakan otonimi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.³¹

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

³⁰ Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta. Hal 18

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Manan³² mengemukakan bahwa sistem rumah tangga pemerintahan daerah tersebut adalah:

1. Harus menjami keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam bidang peraturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga sendiri.
2. Pada dasarnya pengurusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat atas, jadi pemerintah daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.
3. Sebagai konsekuensi dari butir 2 diatas, maka sistem rumah tangga harus memberikan tempat prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.
4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat sendiri.
5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda atau satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah setempat.
6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hukungan desentralistik, setiap bentuk campur

³² Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas UII: Yogyakarta hal 59

tangan pusat atas urusan rumah tangga , tidak boleh mengurangi kemandirian daerah.

2.1.7 Konsep Tugas

Dale Yoer dalam moekijat menjelaskan bahwa dalam sebuah kegiatan terdapat pembagian tugas untuk masing-masing. Walaupun adanya pembagian tugas untuk tiap-tiap orang semua dilakukan untuk pencapaian tujuan.³³

Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achive a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).³⁴

Menurut Winardi³⁵ Tugas pokok dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Tugas merupakan suatu bagian atau suatu unsur komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan lengkap.³⁶

Defenisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner,

³³ Moekijat. 1998. *Analisis jabatan*. Mandar Maju: Bandung.

³⁴ Ibid

³⁵ Winandi, J. 2004, *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

³⁶ Moekijat, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju; Bandung.

menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.³⁷

Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari satu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.³⁸

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat penulis simpulkan bahwa bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai suatu tujuan.

2.1.8 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁹

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁴⁰

Menurut M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013

⁴⁰ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, pengantar manajemen, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009) .6

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.⁴¹

Balderton⁴² mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia yang memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Hamalik⁴³ istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya George R. Terry⁴⁴ pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Moekijat⁴⁵ Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Sedangkan menurut George R. Terry fungsi manajemen yaitu:⁴⁶

⁴¹ Drs. M. Manulang, dasar-dasar Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990) . 15-17

⁴² Balderton dalam Adisasmita, Raharjo, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal 22

⁴³ Ibid

⁴⁴ George R. Terry. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara; Jakarta.

⁴⁵ Moekijat dalam Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu hal 21

⁴⁶ Opcit George R. Terry (2000:16-19)

1. Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikirin dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakkan (actuating) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (Controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efesien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.1.9 Konsep Transportasi

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrial. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut

keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.⁴⁷ Pengertian Transportasi menurut Salim⁴⁸ adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain. Menurut Kadir⁴⁹ dalam usaha memperlancar sistem transportasi sebaiknya semua elemen dimasukkan dalam unsur pokok sistem transportasi yang terdiri atas:

1. Penumpang/barang yang akan dipindahkan.
2. Kendaraan/alat angkutan sebagai sarana.
3. Jalan sebagai prasarana angkutan.
4. Terminal.
5. Organisasi sebagai pengelola angkutan.

Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam atau moda atau jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, segi geografis transportasi itu berlangsung, dan dari sudut teknis serta alat angkutnya. Namun, seringkali orang mengklasifikasinya dihubungkan dengan

⁴⁷ Nasution. 2004. Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia Hal 15

⁴⁸ Opcit Salim

⁴⁹ Opcit Kadir

empat unsur transportasi, yaitu jalan, alat angkutan, tenaga penggerak, dan terminal.

1. Jalan (The Way) Jalan merupakan suatu kebutuhan paling esensial dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dan jalan udara.
2. Alat Angkutan (The Vehicle) Kendaraan dan alat angkutan pada umumnya merupakan unsur transport yang penting lainnya. Perkembangan dan kemajuan jalan dan alat angkutan merupakan dua unsur yang saling memerlukan atau berkaitan satu sama lainnya. Alat angkutan dapat dibagi dalam jenis-jenis alat angkutan jalan darat, alat angkutan jalan air, dan alat angkutan udara.
3. Tenaga Penggerak (Motive Power) Yang dimaksud dengan tenaga penggerak adalah tenaga atau energy yang dapat dipergunakan untuk menarik atau mendorong alat angkutan. Untuk keperluan ini dapat digunakan tenaga manusia, binatang, tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga disel, dan tenaga listrik bahkan juga tenaga atom, dan tenaga nuklir.
4. Tempat Pemberhentian atau Terminal Terminal adalah tempat dimana suatu perjalanan transportasi dimulai maupun berhenti atau berakhir

sebagai tempat tujuannya. Karena itu, di terminal disediakan berbagai fasilitas pelayanan penumpang, bongkar dan muat dan lainlain.

2.1.10 Konsep Terminal

Menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan Kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, Serta perpindahan moda angkutan. Dibutuhkan suatu pelayanan yang baik yang berfungsi secara efektif dan efisien pada sebuah terminal agar mendukung terhadap kelancaran efektifitas dan efisiensi kendaraan umum secara keseluruhan. Sebuah terminal harus mampu memberikan pelayanan yang baik, untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai sebuah terminal yang baik maka kapasitas terminal harus memadai, untuk mencakup semua pergerakan kendaraan umum di suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri No: PM 40 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tahun 2015, Lokasi terminal penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat.⁵⁰

Menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan Kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, Serta perpindahan moda angkutan. Dibutuhkan suatu

⁵⁰ Menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pelayanan yang baik yang berfungsi secara efektif dan efisien pada sebuah terminal agar mendukung terhadap kelancaran efektifitas dan efisiensi kendaraan umum secara keseluruhan. Sebuah terminal harus mampu memberikan pelayanan yang baik, untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai sebuah terminal yang baik maka kapasitas terminal harus memadai, untuk mencakup semua pergerakan kendaraan umum di suatu wilayah.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Menteri No: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Lokasi terminal penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat.⁵²

Menurut Salim Abbas⁵³ pengoperasian terminal/pelabuhan udara dan pelabuhan laut terbagi menjadi 2 unsur

- a. Adapun pengoperasian jasa terminal darat dikelompokkan sebagai berikut:
 1. Terminal bis untuk digunakan oleh bis antar kota dan dalam kota
 2. Stasiun kereta api untuk penumpang dan barang.
 3. Pelabuhan udara fungsinya untuk menampung kedatangan pesawat udara lar negeri/penumpang dalam negeri dan

⁵¹ Ibid

⁵² Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Republik Indonesia 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

⁵³ Opcit Salim Abbas, Manajemen Tarnsportasi Jakarta Rajawali Press 2013 (103-104)

4. Pelabuhan laut; fungsi pelabuhan laut ialah untuk berlabuh, bertambat kapal-kapal dalam negeri dan luar negeri serta turun naiknya penumpang.

b. Karakteristik dan fungsi terminal

1. Terminal adalah titik awal atau akhir dari lin operasional pengangkutan. Fungsi lain terminal ialah untuk pergudangan, penumpukan bongkar muat barang-barang (muatan).
2. Adapun fungsi terminal tergantung pada jenis angkutan (moda sistem) hal mana berbeda yang satu dengan yang lain termasuk fasilitas yang tersedia, terminal bis, pelabuhan udara dan pelabuhan laut.
3. Disamping itu pelabuhan mempunyai fungsi untuk bongkar muat barang, transit pengangkutan, melaksanakan pengisian bahan bakar, oli, dan mengadakan perbaikan alat-alat angkutan dan terpenting ialah selaku penghubung (*link*) Intermoda transportasi (*roadway, Railway port) harbour and ship/vassel*).
4. Dari segi karakteristik konstruksi desain dan fasilitas tersedia berbeda bergantung pada moda transpor, kapasitas, operasional jenis angkutan dan *demand* terhadap jasa transportasi.
5. Untuk koordinasi di lapangan pada umumnya ada kerja sama antara pihak pemerintah dengan unit-unit usaha yang bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini membandingkan penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
Defendi Dwi Indarto ⁵⁴	Sistem Pengelolaan Di Terminal Purabaya (Studi Kasus Di UPTD Terminal Purabaya)	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan sama menggunakan indikator pengukuran yaitu <i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>	Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yang paling mencolok ada pada fokus penelitian yang mana penelitian ini berfokus kepada sistem pengelolaan pelayanan transportasi
Muhammad Rangga Sudarajat ⁵⁵	Pengawasan DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016	Dalam penelitian oleh Muhammad Rangga Sudrajat ini memiliki beberapa persamaan diantaranya adalah sama dalam hal menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif, dan juga sama melihat fungsi dari dalam pengelolaan terminal	Sedangkan perbedaan yang mencolok ada pada fokus penelitian ini, karena fokusnya terletak di pengawasan dan juga teori yang digunakan adalah teori pengawasan seperti <i>Planning, Order terhadap Performance, tujuan dan kebijakan.</i>
Prasetyo Suherman, Dra Sulistyowati, Msi, Dra.	Sistem pengelolaan terminal mangkang kota semarang	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan sama menggunakan	Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yang paling mencolok ada pada fokus

⁵⁴ Jurnal Universitas Surabaya, Oleh Defendi Dwi Indarto, dengan Judul Sistem Pengelolaan Di Terminal Purabaya (Studi Kasus Di UPTD Terminal Purabaya)

⁵⁵ Jurnal Universitas Riau, Oleh Muhammad Rangga Sudarajat, dengan Judul Pengawasan DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016

Fritriyah,MA ⁵⁶		indikator pengukuran yaitu <i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>	penelitian yang mana penelitian ini berfokus kepada sistem pengeloan untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Tengah
----------------------------	--	--	--

Sumber: Olahan Penulis 2020

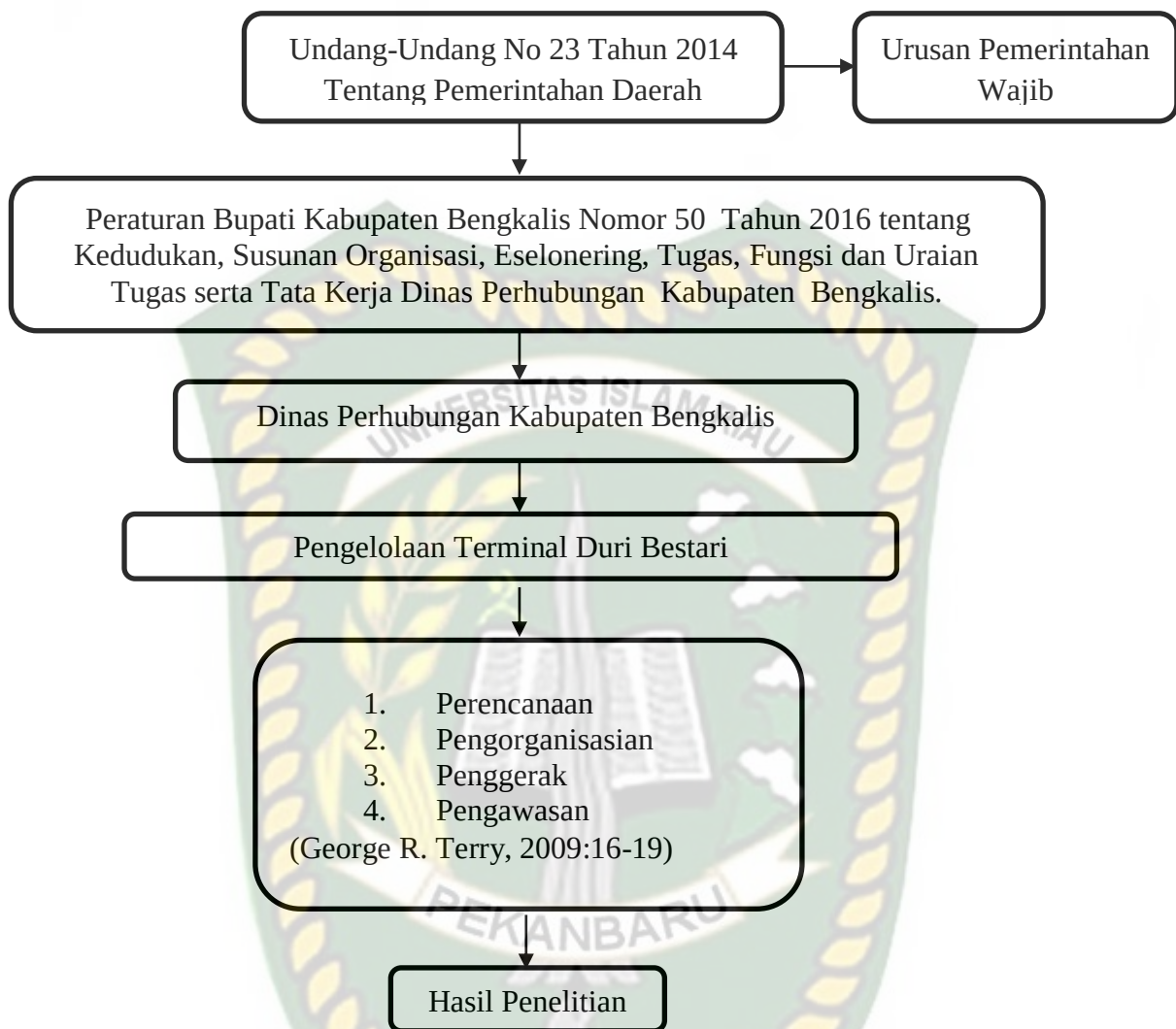
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis kali ini menunjukkan bahwa dari ketiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian tentang pengelolaan terminal dan pengawasannya.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas salah satunya adalah teori yang digunakan pada penelitian tentang pengawasan DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru terhadap fungsi terminal angkutan umum bandar raya payung sekaki menggunakan teori MRP *Planning, Order terhadap Peformance, tujuan dan kebijakan*. Dimana tujuan dari penelitian diatas ini adalah untuk melihat pengelolaan terminal dari pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas terkait dan Unit Pelaksana Teknis terkait.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi Kerangka Pemikiran dari penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari yaitu sebagai berikut:

⁵⁶ Jurnal Universitas Diponegoro, Oleh Prasetyo Suherman, Dra Sulistyowati, Msi, Dra. Fritriyah, MA dengan Judul Sistem pengelolaan terminal mangkang kota semarang



Sumber: Modifikasi Penulis 2020

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari

2.4 Konsep Operasional dan Operasional Variabel

2.4.1 Konsep Operasiaonal

Adapun konsep operasional dari pelaksanaan fungsi dinas perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan Terminal Duri Bestari

- a. Pemerintah daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.
- b. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- c. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
- d. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang.
- e. penggerak merupakan kegiatan yang melakukan aksi dan tindakan.
- f. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- g. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

- h. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu dinas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur transportasi laut, darat, dan udara.

2.4.2 Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendiskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel 2.2: Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai
1	2	3	4
Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu ⁵⁷	Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Perencanaan	1. Adanya target yang ingin dicapai 2. Adanya pengelolaan restribusi 3. Adanya SOP bagi petugas
		Pengorganisasian	1. Adanya tim yang dibentuk untuk restribusi terminal 2. Adanya pembagian tugas dan wewenang 3. Adanya petugas pengawas
		Penggerak	1. Adanya petunjuk pelaksana bagi petugas terminal 2. Adanya petunjuk tertulis untuk pegawai dalam pengelolaan

⁵⁷ George R. Terry. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara; Jakarta.

			retribusi terminal 3. Jelasnya prosedur kerja bagi petugas terminal maupun petugas pajak
		Pengawasan	1. Adanya pemeriksaan pekerjaan petugas terminal dilapangan 2. Adanya pemeriksaan hasil pekerjaan pegawai yang menangani retribusi terminal 3. Dilakukan pemeriksaan dalam bentuk laporan pekerjaan pada petugas atau pegawai

Sumber: Analisa Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi. Berdasarkan fenomena awal dari permasalahan serta uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa dalam pelaksanaan fungsi terminal di kecamatan mandau masih banyak ditemukan permasalahan seperti penulis bahwa lokasi keberadaan terminal yang tidak strategis sehingga sopir angkot atau oplet yang ada di Kecamatan Mandau kurang berpartisipasi untuk transit di terminal Duri Bestari ini. Dan belum adanya jadwal pengaturan keberangkatan angkutan sewa, sehingga menyebabkan pihak pengemudi masih mencari penumpang di jalan.

Untuk itu penulis menjadikan pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari tersebut sebagai subjek dari penelitian yang akan dilaksanakan. Objek kajian dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang didalamnya terdapat: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, UPT terminal Duri Bestari Kabupaten Bengkalis, Pengemudi atau sopir angkutan sewa di Kecamatan Mandau dan juga masyarakat Kecamatan Mandau.

3.2 Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya sesuai dengan pengamatan penulis saat dilapangan yang di

dapatkan melalui cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin⁵⁸

merupakan sebagai jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh dari prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Dalam hal ini dapat berupa riwayat serta perilaku seseorang. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana seperti data sensus, Namun analisisnya bersifat kualitatif.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Terminal Duri Bestari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena Terminal Duri Bestari merupakan salah satu terminal yang memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan retribusi terminal akan tetapi pada saat ini terminal tersebut tidak beroperasi maksimal.

3.4 Informan

Informan adalah orang atau sumber informasi dalam sebuah penelitian. Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data didalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.

Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

⁵⁸Anselm Straus dan Juliet Corbil, 2013. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

1. Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	<i>Key Informan</i>	Djoko Edy Imhar M.Si	50 Tahun	S2	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
2		Syaiful Amri, S.Kom	48 Tahun	S1	Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Pemasu Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
3		Nazar, S.Sos	34 Tahun	S1	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
4		Masmendapria SH	56 Tahun	S1	Kepala UPT Terminal Duri Bestari
7	<i>Informan Utama</i>	Rinaldi	40 Tahun	SMP	Sopir Angkutan Sewa
8	<i>Informan Tambahan</i>	Mansur	42 Tahun	SD	Sopir Angkutan Sewa

⁵⁹ Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta:hal 172

9		Riki	28 Tahun	SMP	Sopir Angkutan Sewa
10		Drs. Tamrin (Ujang Labu)	58 Tahun	S1	Tokoh Masyarakat di Duri Bestari
11		Syahrial (Buyung Jaya)	60 Tahun	SMA	Tokoh Masyarakat di Duri Bestari
12		Ryan Abdi (Boneh)	56 Tahun	SMA	Ikatan Pemuda Pasar Suka Ramai
16		Maria Siregar	38 Tahun	SMP	Penumpang/ Pengguna jasa Angkot sewa
17	<i>Informan Tambahan</i>	Rudiansyah	40 Tahun	SMA	Masyarakat yang ada di Lingkungan Terminal
18		Muhammad A Siregar S.Pd	30 Tahun	S1	Masyarakat yang ada di Lingkungan Terminal
19		Rudiansyah	40 Tahun	SMA	Masyarakat yang ada di Lingkungan Terminal

Catatan: Data Olahan Penulis 2020

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.5.1 Data Primer

Data Primer adalah data utama, asli, atau secara langsung dari sumbernya. Pengertian dari primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah riset secara khusus. Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden penelitian melalui wawancara yang diberikan kepada responden mengenai

3.5.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dari Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri

Bestari ini adalah data yang didapat dari berbagai sumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa dokumen, jurnal, catatan buku arsip yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik:

3.6.1 Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun yang diwawancara penulis dalam hal penelitian Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dan Pemasaran Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Kepala UPT Terminal Duri Bestari, Supir Angkutan Penumpang di Kecamatan Mandau 3 orang dan Masyarakat Pengguna Jasa Angkot 3 orang.

3.6.2 Observasi

Observasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat dan formulir. Melalui observasi penulis dapat mengetahui

langsung kejadian sesungguhnya di lapangan, yaitu pengamatan kegiatan sesungguhnya di lapangan, yaitu pengamatan kegiatan pemerintahan secara langsung. Dalam hal ini yang diamati adalah penelitian Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi sumber-sumber informasi khusus dari tulisan buku-buku, relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data yang relevan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut *Patton*⁶⁰ analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

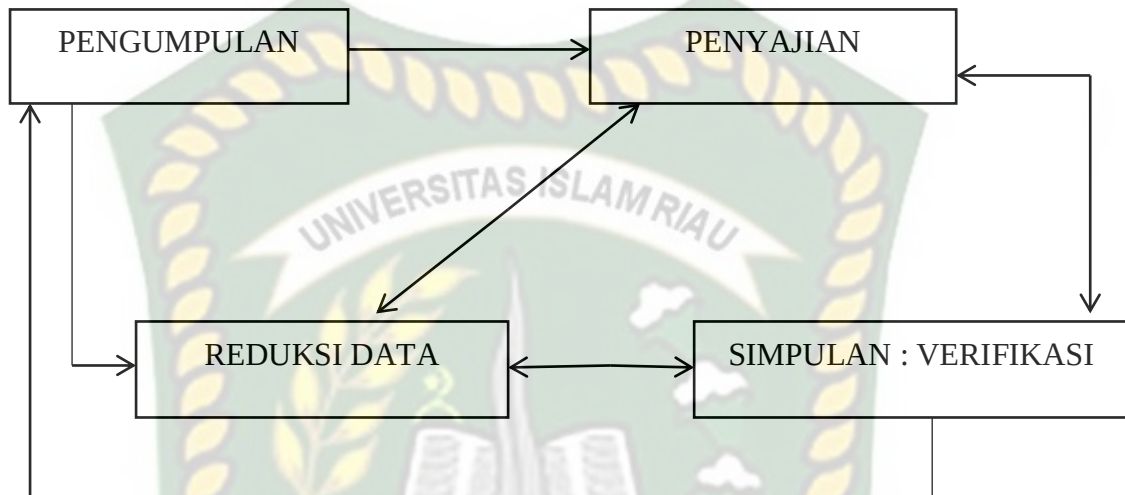
Adapun tujuan analisis data antara lain:

1. Memecahkan masalah-masalah
2. Memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian
3. Memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan

⁶⁰ Patton dalam Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002. Hal 97

4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan selanjutnya.

Gambar 3.1 Komponen – Komponen Analisis Data : Model Interkatif



Sumber : Miles and Huberman⁶¹

Adapun penjelasan dari gambar diatas menurut miles dan Huberman yaitu⁶²:

1. Tahap Pengumpulan data yaitu peneliti akan melakukan proses aktifis pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.
2. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi Data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

⁶¹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP. Hal 20

⁶² Ibid Hal 16-19

3. Penyajian Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.
4. Menarik Kesimpulan verifikasi yaitu sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis.

Dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan analisis Kualitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Iqbal Hasan⁶³ Menjelaskan bahwa “Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini sekedar membaca table-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

3.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, jelas dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi proposal tesis meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II Kajian Kepustakaan : Dalam bab ini dikemukakan dengan umum, ringkas, jelas dan objektif tentang konsep teori ulasan karya kemudian

⁶³ Op Cit Hasan Iqbal Hal 30

menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional dan operasional variabel.

BAB III Dalam bab ini diuraikan tentang : Objek Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Rancangan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian

BAB IV Dalam bab ini diuraikan tentang : hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Dalam bab ini diuraikan tentang : kesimpulan dan saran

3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Terminal Duri Bestari di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke															
		Februari 2020				Maret 2020				Juli 2020				Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X	X												
2.	Seminar Usulan Penelitian					X											
3.	Riset						X	X									
4.	Penelitian Lapangan								X	X							
5.	Pengolahan dan Analisis Data									X	X	X					
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis										X	X	X	X	X		
7.	Ujian Tesis															X	X

Catatan: Data Olahan Penulis 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah Kepulauan, dengan luas wilayah 7.793,93 Km². Ibukota Kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 7.7793,93 Km² dengan jumlah penduduk 498.335 jiwa dan membawahi 8 Kecamatan, 102 Desa/Kelurahan. Ibukota Kabupaten ini berada di Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatera. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang menjalankan kewenangan. Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30' Lintang Utara (LU), -0°17' Lintang Utara atau 100°52' Bujur Timur (BT), -102°52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 Km², meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian di antaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara

Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Jarak kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau

[illegible]

Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Penghasilan terbesar kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBDnya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu

program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT).

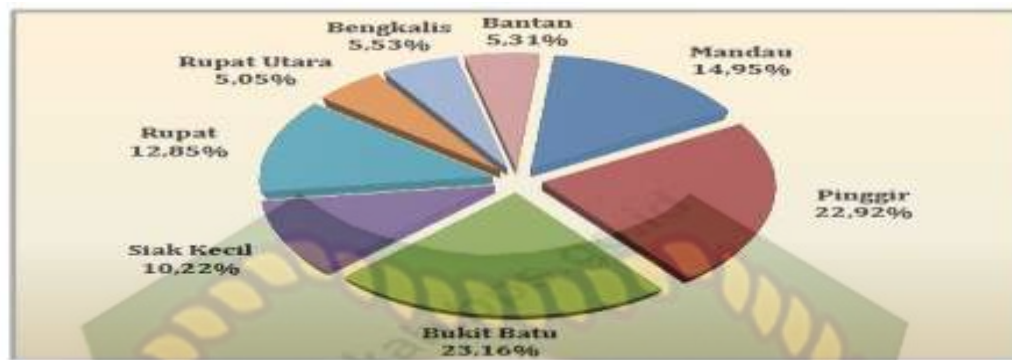
Industri memegang peran penting dalam perekonomian kemasyarakatan di Kecamatan Mandau. Angka yang tercatat oleh Dinas terkait menyebutkan sebanyak dua industri besar dan lima industri sedang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau. Selain industri, perdagangan juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar provinsi dan kabupaten, Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang dalam jumlah yang relatif banyak.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau adalah salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografi yang mana Kecamatan Mandau berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : Kecamatan Pinggir.
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu.
- Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu.
- Sebelah Utara :Kecamatan Pinggir
-

Kecamatan Mandau Terbentang antara 0 56'12"LU- 1 28'17"LU dan 100 56'10" BT – 101 43'26" BT, dengan Ibu Kotanya Air Jamban dan Kecamatan Ketiga Terluas Wilayahnya setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu yang mencapai 937,47 Bumbung yang mencapai luas 104 km atau sebesar 11,09 persen dari luas total kecamatan Mandau.

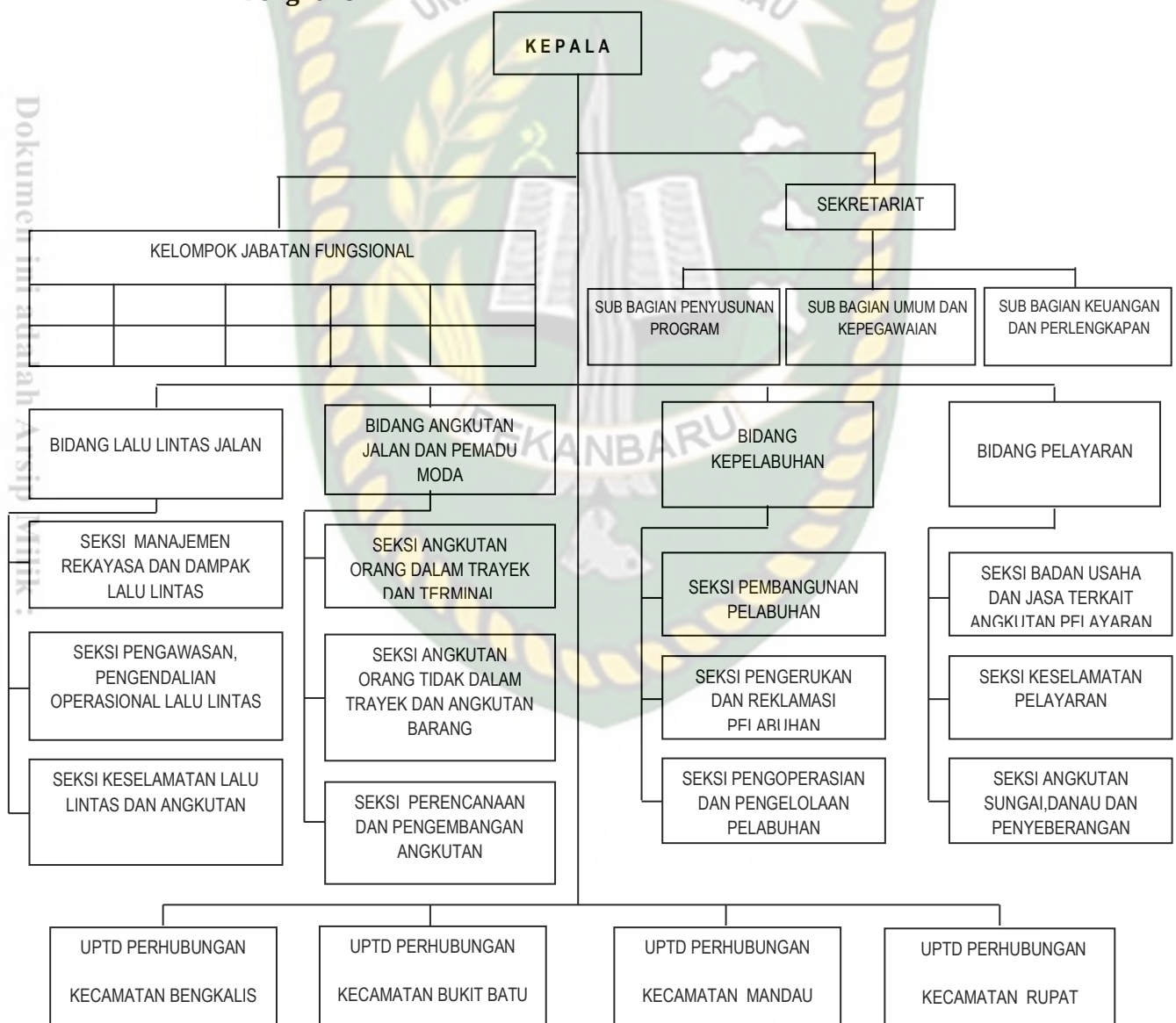


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2020
Gambar 4.2 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan

Secara Topografis Wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari Ibu Kota Kecamatan maka Desa Pamesi dan Desa Bhatin Sobanga adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 53 km dan 43 km. Kecamatan Mandau Terdiri dari 24 Desa/Kelurahan definisi yang mana kalau dilihat dari status pemerintahannya terdiri dari 9 sembilan keseluruhan yang dipimpin oleh lurah dan 15 desa yang dipimpin oleh Kelola Desa, adapun yang berstatus Kelurahan yakni: Talang Mandi, Gajah Sakti, Batang Serosa, Balik Aam, Duri Barat, Duru, Timur, Babu Salam, Air Jamban, dan Pematang Pudu, Sedangkan 15 yang berstatus Desa yaitu: Harapan Baru, Sebangga, Balai Makam, Petani, Bumbung, Kesumbo Ampai, Bathin Betuah, Boncah Mahang, Tambusai Batang Dui Simpang Padang Pematang Obo, Air Kulim, Buluh Manis, Pamesi dan Bathin Sobanga. Jumlah penduduk pada Kecamatan Mandau pada Tahun 2018 adalah 239,361 jiwa, yang terdiri dari 124, 531 jiwa laki-laki dan 114.830 jiwa perempuan. Dari komposisi jumlah laki-laki dan perempuan.

Dengan Luas Wilayah 912,47 km dan jumlah penduduk 239.361 jiwa, ternyata menghasilkan kepadatan penduduk terbesar 263, yang artinya dalam setiap 1 km dihuni oleh sekitar 263 orang. Kecamatan Mandau mempunyai 59,583 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah warga dalam keluarga adalah empat orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan.

4.1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis



Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2020

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

a. Fungsi dan Tata Organisasi

Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat Struktural yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan.

Kepala menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;
 - e) Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perhubungan;
 - f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perhubungan;
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

Perhubungan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program anggaran di bidang perhubungan;
- b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Sub Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang rekayasa dan dampak lalu lintas, operasional jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penetapan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan bidang manajemen rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan;
- b) Penetapan rumusan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengelolaan sarana transportasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :

- a) Seksi Manajemen Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang manajemen lalu lintas jalan.

b) Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas.

c) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan.

4) Bidang Angkutan dan Pemandu Moda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang angkutan orang dalam trayek dan terminal, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang dan perencanaan serta pengembangan angkutan;

Bidang Angkutan dan Pemandu Moda menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang dan barang, serta pemandu moda dan pengembangan;
- b) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan angkutan;
- c) Penyusunan rencana teknis jaringan Trayek angkutan dalam

Kabupaten;

- d) Pengembangan angkutan berbasis teknologi informasi manajemen'
- e) Penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan penumpang dalam trayek dan angkutan massal terintegrasi;
- f) Penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan penumpang tidak dalam trayek dan angkutan khusus;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Angkutan dan Pemandu Moda, terdiri dari :

- a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang angkutan orang dalam trayek dan terminal.
- b) Seksi Angkutan Orang tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.
- c) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perencanaan dan

pengembangan angkutan.

- 5) Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang perhubungan;

Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Angkutan dan Pemandu Moda, terdiri dari :

- a) Seksi Pembangunan Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pembangunan Pelabuhan.

- b) Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pengerukan dan

Reklamasi Pelabuhan.

c) Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

6) Bidang Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang angkutan pelayaran.

Bidang Angkutan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi di bidang Pelayaran, terdiri dari :

a) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran.

b) Seksi Keselamatan Pelayaran.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang keselamatan pelayaran.

c) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

tugas dan fungsi bidang perhubungan darat sebagai berikut:

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan Terminal, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terminal dan pangkalan;

- c. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan;
- d. Melaksanakan penertiban dan pengaman di dalam terminal dan pangkalan;
- e. Melaksanakan ketatausahaan UPT Terminal;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas, meliputi : operasional terminal.

UPTD Perhubungan di dirikan sekitar tahun 1990 dan mulai di operasikan sekitar tanggal 01 September Tahun 1991 di bawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Namun dengan berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2001 di mana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka di Kabupaten Bengkalis dibentuklah lembaga-lembaga pemerintahan daerah termasuk salah satunya UPTD Perhubungan yang secara langsung berada di bawah naungan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya dengan berlakunya otonomi daerah terjadi beberapa

perubahan-perubahan salah satunya terjadi pemisahan antara 3 (tiga) wilayah hukum yaitu kewenangan yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) berada di bawah naungan Departemen Perhubungan dan berubah nama menjadi Dinas Perhubungan (DISHUB), kemudian pada 2009 berubah nama menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dan pada akhir 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan kembali, di mana terjadi pemisahan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika. Pada saat ini Komunikasi dan Informatika membentuk lembaga tersendiri sehingga pada saat ini berubah kembali menjadi Dinas Perhubungan. UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau - Pinggir merupakan instansi yang terletak di Jalan Lintas Duri - Dumai KM 14 Kulim Duri.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melakukan upaya penyelenggaraan ketertiban lalu lintas di bidang darat dan penetapan sarana dan prasarana serta peraturan jalan, melakukan upaya pengawasan prasarana komunikasi dan informatika, melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap personil Unit Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau. UPT Dinas Perhubungan bertekad untuk mewujudkan terciptanya tatanan transportasi yang semakin berkualitas antara lain dengan menata sistem transportasi di Kota Duri sebagai daerah kecamatan yang sangat luas yang termasuk ke dalam daerah Kabupaten Bengkalis. Dan mengawasi manajemen rekayasa lalu lintas pada beberapa pusat-pusat kegiatan perusahaan yang ada di kota Duri.

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

VISI

Visi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dirumuskan dan diarahkan untuk menunjang terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan ketentuan tersebut visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu berperan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai berikut:

Visi

”TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG LEBIH BAIK UNTUK Mendukung, Kelancaran, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkalis”

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah :

1) Keselamatan dan kelancaran Transportasi.

Peningkatan keselamatan dan kelancaran sistem transportasi serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang menggambarkan tertibnya kondisi transportasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat secara aman dan nyaman. Dengan tertibnya transportasi diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sehingga

dapat menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

2) Menunjang Pembangunan Daerah.

Artinya dengan aman, tertib, lancarnya dan terkendali arus pembangunan bidang Dishub yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Bengkalis maka dapat menjadi faktor yang sangat menunjang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah terutama untuk mensuplay bahan-bahan kebutuhan pokok dan bahan material untuk pembangunan disemua bidang sehingga dapat membuka daerah-daerah yang terisolir.

3) Peningkatan Pendapatan Daerah di bidang Dishub

Dengan berkembangnya iklim usaha yang kondusif berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan daerah dari sektor perhubungan juga meningkat.

Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan Misi sesuai dengan mandat yang diterima. Diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, serta mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang, maka disusun Pernyataan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kedepan sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, lancar, tertib dan terkendali.

Dalam upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang terkendali, aman dan lancar, sehingga dapat mengurai arus lalu lintas yang padat pada ruas - jalan di daerah - daerah yang berada di kabupaten Bengkalis.

- 2) Mewujudkan sarana angkutan umum Pedesaan dan Perkotaan

Dalam upaya mewujudkan sarana angkutan umum guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, sebagai salah satu sarana transportasi angkutan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

- 3) Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dan tepat sasaran.

Dalam upaya mewujudkan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai, sehingga dapat membuka akses daerah-daerah yang masih terisolir di Kabupaten Bengkalis.

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, sehingga dapat mewujudkan program dan kegiatan yang telah terencana sesuai visi misi SKPD dan Kabupaten.

- 5) Mewujudkan Kapasitas kelembagaan.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dalam upaya memperoleh akuntabilitas dan kinerja yang baik.

4.1.4 Gambaran Umum Terminal Duri Bestari

Pada kecamatan mandau terdapat satu terminal yang menjadi aset daerah. Terminal tersebut sudah beroperasi sangat lama. Masa kejayaan terminal Duri Bestari ini pada saat kecamatan mandau belum mekar menjadi kabupaten Rokan Hilir siak dan lain sebagainya. Terminal Duri Bestari didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Mandau untuk bepergian dan memperlancar arus kendaraan lalu lintas di Kota Duri karena banyak angkutan sewa yang mengambil sewa di jalan, dan menyebabkan lalu lintas yang tidak teratur sehingga mengakibatkan macet.

Setelah mekar maka terminal Duri Bestari ini lebih berfokus kepada angkutan sewa yang beroperasi di Kota Duri atau Kecamatan Mandau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis. Dan juga Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.



Gambar 4.4 Terminal Duri Bestari

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam pengelolaan Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari yang berada di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis harus berlandaskan peraturan seperti peraturan daerah dan peraturan Bupati untuk memberikan dasar hukum bagi Dinas maupun penyelenggara pemerintahan seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat Struktural yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan. Kepala menyelenggarakan fungsi:⁶⁴

Bidang Angkutan dan Pemandu Moda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang angkutan orang dalam trayek dan terminal, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang dan perencanaan serta pengembangan angkutan; Susunan organisasi di bidang Angkutan dan Pemandu Moda, terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal. Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,

⁶⁴ Opcit Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

pemantauan, dan evaluasi di bidang angkutan orang dalam trayek dan terminal.

- b. Seksi Angkutan Orang tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang. Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan. Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengembangan angkutan.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan di atas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas perhubungan adalah yang menyelenggarakan Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau. Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Terminal. Hal ini tertuang dalam pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menjelaskan tugas dan fungsi bidang perhubungan darat sebagai berikut:⁶⁵

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan Terminal, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perhubungan

⁶⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- b. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terminal dan pangkalan;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan;
- d. Melaksanakan penertiban dan pengaman di dalam terminal dan pangkalan;
- e. Melaksanakan ketatausahaan UPT Terminal;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa fungsi dari Dinas perhubungan dan struktur organisasi di lingkungan Dinas perhubungan tersebut seperti bidang angkutan pemandu moda dan juga unit pelaksana teknis Dinas perhubungan dalam hal pengelolaan terminal yang dalam arti terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan terminal Duri Bestari dianalisis melalui indikator sebagai berikut:

4.2.1.1 Perencanaan

Perencanaan atau dalam teori *George R Terry* dikenal dengan *planning* yang diambil dalam bahasa Inggris yang memiliki arti, menetapkan pekerjaan

yang harus dilakukan atau yang dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan atau yang di kehendaki bersama. *Planning* atau perencanaan mencakup kegiatan pengambilan Keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif Keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.⁶⁶

Untuk mengetahui perencanaan pelaksanaan fungsi Dinas perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

“Perencanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini adalah perumusan kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berwujud Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis. Di mana peraturan tersebut menegaskan bahwa Dinas perhubungan membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal ini termasuk dengan pengelolaan terminal Duri Bestari yang berada di Kota Duri. Selanjutnya dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa pada pelaksanaan pengelolaan terminal itu menjadi wewenang kepala bidang pemandu moda untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terminal yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk di lapangan itu sendiri pada terminal kelas B tepatnya terminal Duri bestari yang berada di Kecamatan Mandau ini dikendalikan oleh Unit Pelaksana Tugas Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.”⁶⁷

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

⁶⁶ Opcit George R Terry 2000

⁶⁷ Wawancara terkait perencanaan pengelolaan terminal Bapak Djoko Edy Imhar M.Si_Pada Tanggal 21 Juli 2020

“Sudah jelas sangat tepat sasaran karena dalam peraturan tersebut sangat rinci dan juga peraturan tersebut telah membagi tugas-tugas pelaksana di lapangan seperti Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja UPT Terminal misalnya, salah satu fungsi UPT Terminal tersebut adalah Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terminal dan pangkalan, maka dari itu perencanaan ini sudah sangat tepat sasaran.”⁶⁸,

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis dari indikator perencanaan sudah sangat bagus dan baik hal ini bisa dilihat pada peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis seperti Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis, dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

Namun hal ini tidak selaras dengan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Perhubungan yang menyatakan:

“Perencanaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana teknis terminal Duri Bestari sudah baik, adapun bentuk perencanaan tersebut seperti penyusunan program kerja dari Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Perhubungan dan lain sebagainya. Tetapi kalau peraturan Bupati kami tidak mengetahuinya karena saya baru dilantik kurang dari 1 tahun jadi saya tidak mempunyai peraturan seperti yang saudara katakan tadi”⁶⁹,

⁶⁸ Wawancara terkait perencanaan pengelolaan terminal Bapak Djoko Edy Imhar M.Si Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁶⁹ Wawancara terkait perencanaan pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria SH Pada Tanggal 21 Juli 2020

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari Dinas Perhubungan yang menyatakan:

“Saya melaksanakan tugas menjadi kepala Unit Pelaksana Teknis terminal Duri Bestari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh UPT Terminal Duri Bestari selama ini, jadi saya hanya melanjutkan kerja yang ada saja.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa perencanaan program kerja dari Unit Pelaksana Teknis Terminal sudah cukup baik sebagai contoh perencanaan tersebut adalah penyusunan program kerja pada staf pendukung yang ada di Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri bestari. Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang terkait dengan penjelasan di atas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari Dinas Perhubungan yang menyatakan:

“Kalau rencana kerja di lapangan untuk kawasan terminal ini sudah tepat sasaran karena anggota Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari Dinas Perhubungan di kecamatan Mandau dan di bantu oleh Dinas perhubungan di bidang pembantu moda dan trayek terminal sekali dalam seminggu selalu melaksanakan kegiatan operasi atau ngepam dimana ngepam ini kami lakukan turun pejalan untuk mengutip uang restribusi kepada sopir angkot yang tidak mau transit di terminal Duri Bestari.”⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Dinas Perhubungan dan Unit pelaksana Teknis selalu melakukan operasi turun pejalan untuk mengutip atau meminta uang restribusi kepada sopir angkot yang tidak mau transit ke terminal Duri Bestari dengan menukarkan karcis restribusi dengan uang Rp.1000 untuk satu karcis.

⁷⁰ Wawancara terkait perencanaan pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁷¹ Wawancara terkait perencanaan pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria Pada Tanggal 21 Juli 2020

Berdasarkan hasil penelitian tentang perencanaan dalam pengelolaan ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis yang dibantu Unit Pelaksana teknis Terminal Duri Bestari kurang koordinasi terkait dengan peraturan ataupun kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tidak diketahui oleh kepala Unit Pelaksana Teknis terminal Duri Bestari, perencanaan yang berjalan yang dapat dikatakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari adalah perencanaan kegiatan pelaksanaan program kerja di terminal.

4.2.1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian atau yang ketahu (*Organizing*) merupakan langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.⁷² Dalam teori *George R Terry* adalah Pengorganisasian *Organizing* mencakup: (a) membagi komponen – komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok – kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang pimpinan atau manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan

⁷² Malayu S.P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara hal 40-41

(c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit – unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Di dalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama.

Untuk melihat pengorganisasian dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Pemadu Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

“Pembagian tugas pelaksanaan fungsi Dinas perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari ini sudah sangat jelas, bisa dilihat dari Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis Bidang Angkutan dan Pemandu Moda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang angkutan orang dalam trayek dan terminal, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang dan perencanaan serta pengembangan angkutan.”⁷³,

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Pemadu Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

“Jadi pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di terminal Duri Bestari ini kita dari Dinas perhubungan melakukan pendampingan seperti ngepam di jalan dan sebagainya bersama anggota di Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri bestari dan juga melakukan evaluasi kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari tersebut .”⁷⁴

⁷³ Wawancara terkait pengorganisasian pengelolaan terminal Bapak Syaiful Amri, S.Kom Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁷⁴ Wawancara terkait pengorganisasian pengelolaan terminal Bapak Syaiful Amri, S.Kom Pada Tanggal 21 Juli 2020

Untuk mendapatkan gambaran yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari yang menyatakan:

“Jadi kalau pembagian tugas di terminal ini, yang pertama administrasi yang kedua pengurus distribusi, yang ketiga petugas lapangan yang keempat kebersihan dan yang kelima keamanan. Kenapa di Unit Pelaksana Teknis terminal dibentuk demikian, supaya tertata administrasinya dengan rapi dalam ruang lingkup terminal, supaya mempermudah untuk memasukkan oplet ke dalam terminal. Supaya berjalan dengan lancar kegiatan Unit Pelaksana Teknis terminal dibentuklah tugas tugas masing2 bagian.”⁷⁵”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari yang menyatakan:

“Mudah-mudahan selama saya menjabat kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari sudah berjalan dengan baik.”⁷⁶”

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa dalam pengorganisasian Dinas Perhubungan dan juga Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari sudah melakukan *organizing* dengan semaksimal mungkin, di mana pembagian tugas yang disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Pemasu Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sudah berdasarkan dari Peraturan Bupati (PerBub) Kabupaten Bengkalis, sedangkan pada lingkungan terminal yang

⁷⁵ Wawancara terkait pengorganisasian pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁷⁶ Wawancara terkait pengorganisasian pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria Pada Tanggal 21 Juli 2020

dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari sendiri sudah membagi tugas pokok dan fungsi anggota terminal sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengorganisasian dalam pengelolaan terminal Duri Bestari ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis yang dibantu Unit Pelaksana teknis Terminal Duri Bestari sudah cukup berjalan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bagian baik dari Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Pemadu Moda Dinas Perhubungan, dan Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Terminal Dinas Perhubungan serta staf pendukung di Unit Pelaksana Teknis Terminal (UPT). Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu terdapat ego sektoral antara Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal hal ini terlihat dari hasil penelitian penulis yang dimana Kepala UPT tidak mengetahui atau mempunyai aturan atau peraturan tentang Dinas Perhubungan dan juga peraturan tentang UPT tersebut.

4.2.1.3 Penggerak

Tercapainya tujuan tidak tergantung kepada perencanaan (*planning*) dan pengorganisasian (*organizing*) yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode

kerja, prosedur dan program⁷⁷. Menurut *George R. Terry* dalam bukunya *Principles of Management*⁷⁸ mengatakan bahwa

“Penggerakan merupakan membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkeinginan berkehendak dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan dengan ikhlas juga serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah hingga ke bawah. Semua kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal ini pasti akan terjadi *mis-management*.

Untuk melihat penggerak atau (*actuating*) dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

“Kalau prosedur kerja jelas, tentu kami memiliki hal seperti itu, itu bisa dilihat dari Peraturan Bupati (PerBub). Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas tugas dari anggota pelaksana terminal seperti Unit Pelaksana Teknis Terminal dan jajarannya menurut saya sudah cukup baik, karena pada Peraturan Bupati yang terbaru yaitu Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa yang dulunya Unit Pelaksana Tugas Terminal Duri Bestari juga melakukan fungsi seperti Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Parkir, sekarang hanya mengurus bagian terminal saja yaitu mengurus redistribusi dan memasukkan oplet untuk ngetam di

⁷⁷ Goerge R. Terry (dalam Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen 2011 hal 82-83)

⁷⁸ Ibid

terminal. Maka dari itu dengan Peraturan Bupati ini pelaksana atau penggerak ini akan semakin jelas tugas apa saja yang harus dilakukan.”⁷⁹

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas dengan Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

“Jadi kalau menurut saya terminal Duri Bestari ini sudah cukup aktif, karena dari prosedur saja sudah semakin jelas, akan tetapi hal ini mungkin disebabkan oleh minat dari pengguna oplet yang ada di Duri itu sendiri semisal sopir oplet itu sendiri masih banyak yang mangkal di pasar dari pada di terminal Duri Bestari itu sendiri, jadi itu memang faktor luarnya saja. Sehingga jika penggerak dari Dinas Perhubungan yang di jalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal saja yang menginginkan oplet itu ngetam di terminal tetapi sopir opletnya sendiri tidak mau, jadi itu persoalan kita bersama, maka dari itu yang saya sampaikan tadi bahwa dengan peraturan tersebut tugas dari pelaksana atau penggerak dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Terminal semakin tajam dan jelas apa yang harus dilakukan dengan persoalan tersebut.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dikatakan bahwa penggerak ataupun pelaksana seperti Dinas Perhubungan dan Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Pemandu Moda dan juga Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sudah memiliki prosedur kerja yang jelas sehingga penggerak ataupun pelaksana dalam hal ini sudah mengerti tugas dan fungsi dari masing-masing kelompok dan itu pun termasuk Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari yang dulunya memegang 3 (tiga) komponen bidang sekarang di pecah menjadi 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis

⁷⁹ Wawancara terkait penggerak pengelolaan terminal Bapak Syaiful Amri, S.Kom Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁸⁰ Wawancara terkait penggerak pengelolaan terminal Bapak Nazar, S.Sos Pada Tanggal 21 Juli 2020

(UPT) yaitu UPT Parkir, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan UPT Terminal.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penggerak atau (*actuating*) dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari yang menyatakan:

“Prosedurnya tentu saja ada, pelaksanaan yang telah saya susun selama saya menjabat menjadi kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal yaitu yang pertama saya mencoba untuk mendisiplinkan petugas, karena kalau petugas disiplin maka kerjaan yang akan di berikan tidak akan di sia-siakan, yang kedua adalah bagaimana cara agar oplet atau angkot dapat masuk ke dalam terminal, misalnya oplet atau angkot yang dari pasar agar masuk ke terminal setiap hari jam kerja.”⁸¹

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari yang menyatakan:

“Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk, tetapi sekarang jumlah oplet atau angkot tersebut sudah berkurang, maksudnya berkurang itu tidak seperti yang dulu lagi, dan sekarang pun sudah ada ojek Online, ojek pangkalan, dan lain sebagainya.”⁸²

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa terminal Duri Bestari sudah memiliki prosedur kerja bagi staff pendukung sebagai contoh prosedur kerja tersebut adalah membagi tugas kepada staf tersebut seperti bagian pemungutan retribusi, bagian administrasi, bagian keamanan dan juga bagian

⁸¹ Wawancara terkait penggerak pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁸² Wawancara terkait penggerak pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria Pada Tanggal 21 Juli 2020

lingkungan dan kebersihan terminal. Pada dasarnya ini diterapkan guna untuk mendisiplinkan para pelaksana yang ada di terminal Duri Bestari ini.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang terkait dengan penjelasan di atas kepada masyarakat yang ada di Lingkungan Terminal Duri Bestari yang menyatakan:

“Itu karena lokasi terminalnya tidak dekat dengan pasar, jadi mutar balek sopir angkot itu pasti tidak mungkin, kalau misalnya di depan terminal ini ada pasar maka terminal ini mungkin bisa ramai sopir angkot untuk ngetam atau transit disini.”⁸³

Berdasarkan hasil penelitian tentang penggerak (*actuating*) ditemukan bahwa penggerak atau pelaksana dari Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari sudah mempunyai prosedur yang jelas dan juga tugas pokok yang juga jelas, di mana itu digunakan untuk melaksanakan tugas anggota pelaksana untuk mendapatkan hasil yang maksimal akan tetapi permasalahan sopir angkot atau oplet itu tidak ngetam di terminal dikarenakan lokasi dari terminal yang berada jauh dari pasar yang mengakibatkan sopir angkot ataupun oplet malah mangkal di pasar dan di tempat lain.

4.2.1.4 Pengawasan

Pengawasan ataupun (*controlling*) memiliki peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, pengawasan itu mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerak (*actuating*)

⁸³ Wawancara terkait penggerak pengelolaan terminal Bapak Muhammad A Siregar S.Pd Pada Tanggal 21 Juli 2020

baik, namun apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian pengawasan ataupun *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan supaya tertuju kepada sasaran, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

George R Terry mengemukakan bahwa Pengawasan ataupun (*controlling*), yaitu⁸⁴

“Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan akan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran)”⁸⁵.

Untuk melihat pengawasan atau (*controlling*) dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

“Pengawasan yang kami lakukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah berupa pengawasan dalam bentuk laporan dan juga pengawasan dalam bentuk lapangan langsung, sebagai contoh pengawasan dalam bentuk laporan adalah laporan bulanan dan laporan lainnya yang diberikan oleh setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini UPT Terminal. Dan bentuk pengawasan lapangan langsung adalah melakukan patroli atau yang bisa dikatakan dengan ngepam di jalanan dan pasar dan juga terminal itu sendiri.”⁸⁶

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang terkait dengan penjelasan di atas kepada dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

⁸⁴ Opcit George R. Terry (Dalam Sukarna, 2011hal 110)

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Wawancara terkait pengawasan pengelolaan terminal Bapak Djoko Edy Imhar M.Si Pada Tanggal 21 Juli 2020

“Menurut saya ini berjalan cukup baik, karena dari laporan bulanan dan pengawasan lapangan setiap ada instruksi anggota cepat tanggap untuk melakukannya.”⁸⁷

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang terkait dengan penjelasan di atas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

“Hal inilah yang harusnya menjadi evaluasi dari pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari, agar dapat memaksimalkan fasilitas yang ada di terminal bagi pengguna jasa terminal tersebut. Akan tetapi tidak hanya dari sudut pandang itu saja selama ini sopir angkot atau oplet itu tidak melakukan ngetam di terminal mereka beralasan bahwa lokasi terminal yang sangat jauh dari titik kumpul penumpang, dimana titik kumpul penumpang itu adalah di pasar sehingga kalau sopir angkot itu ngetam di terminal mereka tidak mendapatkan penumpang begitu yang terjadi.”⁸⁸

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas pengawasan atau *controlling* dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari ini, penulis melakukan wawancara dengan sopir angkot atau oplet yang ada di Kota Duri yang menyatakan:

“Kadang orang Dinas dan terminal itu mengutip uang redistribusi pak, kadang ada juga orang Dinas dan terminal ngepam sesekali.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diatas sopir angkot mengatakan bahwa Dinas Perhubungan ataupun Unit Pelaksana Teknis melakukan pengutipan redistribusi di pasar dan tempat mangkal angkot selain di terminal dan sewaktu-waktu Dinas Perhubungan dan juga Unit Pelaksana Teknis melakukan operasi atau penertiban di jalan-jalan protokol.

⁸⁷ Wawancara terkait pengawasan pengelolaan terminal Bapak Djoko Edy Imhar M.Si Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁸⁸ Wawancara terkait pengawasan pengelolaan terminal Bapak Djoko Edy Imhar M.Si Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁸⁹ Wawancara terkait pengawasan pengelolaan terminal Bapak Mansur Pada Tanggal 21 Juli 2020

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dikatakan bahwa pengawasan atau *controlling* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sudah baik dan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, dan juga bentuk pengawasan tersebut seperti laporan bulanan dari Unit Pelaksana Teknis Terminal dan juga pengawasan langsung yang dilakukan di lapangan seperti operasi lapangan yang biasa disebut dengan ngepam. Terkait dengan hasil yang masih belum memuaskan terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap terminal Duri Bestari dalam hal memasukkan angkot atau oplet ke dalam terminal masih belum maksimal dikarenakan faktor eksternal ataupun faktor lokasi dari terminal yang tidak menguntungkan bagi sopir angkot atau oplet itu sendiri.

4.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam pengelolaan Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Pada pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Terminal Duri Bestari terdapat beberapa faktor penghambat, faktor penghambat dalam pengelolaan terminal adalah faktor penentu keberhasilan dari suatu manajemen kinerja pada pengorganisasian, adapun faktor penghambat itu adalah

4.2.2.1 Rencana Kebijakan Awal

Untuk melihat faktor penghambat dari rencana awal kebijakan pada pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Terminal Duri Bestari penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat yang ada di Lingkungan Terminal Duri Bestari yang menyatakan:

“Untuk sekarang ini terminal Duri Bestari tidak lagi dipakai untuk pangkalan angkot ataupun oplet, tetapi hanya sebatas transit saja, kalau area di terminal ini digunakan warga sebagai lahan untuk mencari nafkah itu memang di sediakan sekalian menjaga keamanan dari terminal Duri Bestari ini. Kalau terminal Duri Bestari ini saya rasa untuk tempat transit sudah berjalan walaupun tidak maksimal, itu dikarenakan letak terminal ini yang jauh dari titik kumpul seperti pasar.”⁹⁰

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Kota Duri yang menyatakan:

“Terkait dengan pengelolaan terminal Duri Bestari, saya rasa cukup baik, apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Terminal selama ini kalau dari segi pengelolaannya ya.”⁹¹

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Kota Duri yang menyatakan:

“Mungkin ada, kalau menurut saya hambatan yang terjadi dalam pengelolaan terminal ini adalah salah tempat waktu pembangunan awal atau perencanaan waktu memilih lokasinya yang salah kalau menurut saya, karena pada era sekarang kita tahu saja kalau keberadaan sopir angkot atau oplet ini semakin lama semakin berkurang karena sudah ada ojek Online, ojek pangkalan dan lain sebagainya.”⁹²

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari dan juga Tokoh Masyarakat yang berada di Kota Duri dikatakan bahwa kemajuan teknologi seperti era sekarang ini menjadi salah satu faktor penghambat dari pengelolaan terminal Duri Bestari karena dengan kemajuan teknologi ini mengakibatkan berkurangnya keberadaan sopir angkot atau oplet tersebut dan ditambah lagi dengan lokasi dari terminal yang jauh dari

⁹⁰ Wawancara terkait rencana kebijakan awal terminal Bapak Rudiansyah Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁹¹ Wawancara terkait rencana kebijakan awal pengelolaan terminal Bapak Drs. Tamrin (Ujang Labu) Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁹² Wawancara terkait rencana kebijakan awal pengelolaan terminal Bapak Syahrial (Buyung Jaya) Pada Tanggal 21 Juli 2020

pasar yang mengakibatkan terminal ini jarang dilalui oleh sopir angkot atau oplet untuk transit.

Berdasarkan hasil penelitian pada faktor penghambat Rencana kebijakan awal yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilihan lokasi dari terminal Duri Bestari yang di Bangun pada tahun 2003 yang lalu, ini menjadi faktor penghambat yang sangat besar karena masyarakat dan juga sopir angkot mengeluhkan hal yang sama bahwa lokasi dari terminal tersebut terlalu jauh dari pusat keramaian atau pasar.

4.2.2.2 Komunikasi Antar Organisasi

Untuk melihat faktor penghambat dari komunikasi organisasi pada pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Terminal Duri Bestari penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan:

“Saya rasa tidak ada hambatan dalam pembagian tugas dan wewenang dalam pengorganisasian pada Dinas Perhubungan dan juga Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari ini. “apa betul itu, Kalau memang betul Kepala UPT tidak mengetahuinya bisa jadi kurang komunikasi antara saya selaku Kepala Dinas Perhubungan dengan Kepala UPT tersebut, sepengetahuan saya yang menjabat menjadi Kepala UPT tersebut adalah ibuk yang baru dilantik dulunya beliau dari Kelurahan, bisa jadi itu betul.”⁹³

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi antara organisasi Dinas Perhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis terminal kurang harmonis, yaitu dari Kepala Dinas Perhubungan dan Juga Kepala Unit pelaksana

⁹³ Wawancara terkait komunikasi pengelolaan terminal Bapak Djoko Edy Imhar M.Si Pada Tanggal 21 Juli 2020

Teknis Terminal di mana kurangnya komunikasi antara dua pihak tersebut, bisa dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal, hasil penelitian tersebut penulis dapatkan suatu kesimpulan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis tidak mengetahui tentang Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

4.2.2.3 Partisipasi Sopir Angkot dan Masyarakat

Untuk melihat faktor penghambat dari partisipasi Sopir angkot dan juga masyarakat dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Terminal Duri Bestari penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari yang menyatakan:

“Sosialisasi, kalau turun kelapangan anggota kita sewaktu-waktu dan hampir selalu turun kelapangan untuk memungut restribusi angkot, walaupun keberadaan angkot ini sekarang berkurang, tetapi terminal Duri Bestari ini setelah pemecahan yang dulunya juga mengurus parkir dan PKB, sekarang hanya mengurus sarana prasarana terminal dan memasukkan angkot atau oplet ke dalam terminal ini saja. “ya kita tahu saja, selain jumlah angkot, sekarang lagi ada pandemi covid 19, jadi anak sekolah libur otomatis jumlah penumpang angkot berkurang, kalau hambatan itu sendiri dari faktor luar menurut saya juga ada, seperti partisipasi dari sopir angkot itu sendiri, dan juga partisipasi masyarakat, contohnya dalam pemungutan restribusi, oplet ini masuk ke terminal, tetapi sopir angkot tersebut (mintak cop) menunda pembayaran pada sesi berikutnya untuk tidak bayar restribusi sebesar Rp.1000, sopir angkot ini kalau ada petugas yang jaga di sini baru mau transit di terminal ini, kalau tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang masuk, kami selaku UPT

seperti apa mau menimbang hal tersebut, penumpang mereka juga tidak banyak untuk saat sekarang ini.”⁹⁴

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang terkait dengan penjelasan di atas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari yang menyatakan:

“Mau diberikan sanksi seperti apa, kalau diterapkan hukumnya yang baik bagi sopir angkot, banyak tu kir yang mati, sim angkot yang tidak layak. Tapi mau di bagaimanakan lagi, kami saja kalau boleh jujur 1 hari untuk mungut restribusi dapat Rp.40.000 saja sudah mantap itu, seperti itulah kondisi angkot di terminal kita ini.” “seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa anggota Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari ini jika mereka berdiri di terminal maka sopir angkot tersebut baru transit di terminal ini walau pun dalam kenyataanya jika tidak ada yang jaga maka sopir angkot tersebut tidak masuk. Itu yang menjadi dilema karena jika masuk pun tidak sedikit sopir angkot yang mintak tangguh (atau tidak bayar dulu) uang restribusi tersebut, jadi kalau menurut saya pengawasan ini sudah kami lakukan tetapi kembali lagi faktor penghambatnya adalah partisipasi dari sopir angkot tersebut.”⁹⁵

Berdasarkan wawancara di atas di kemukakan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal itu sangat tergantung dengan partisipasi dari sopir angkot tersebut, jadi faktor penghambat dari indikator pengawasan dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari seperti yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Duri Bestari ada faktor penghambat dari partisipasi sopir angkot.

Untuk mendapatkan keabsahan data penulis melakukan wawancara dengan sopir angkot yang menyatakan:

⁹⁴ Wawancara terkait partisipasi pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁹⁵ Wawancara terkait partisipasi pengelolaan terminal Ibuk Masmendapria Pada Tanggal 21 Juli 2020

“Penindakan seperti apa pak, sanksi dari anggota UPT tidak ada pak, kadang anggota terminal itu memungut uang Rp.1000, itu saja pak.”⁹⁶

Untuk mendapatkan keabsahan data penulis melakukan wawancara dengan sopir angkot yang menyatakan:

“Harapan kami ya kalau bisa terminal itu tidak disitu pak letaknya, karena lokasi terminal itu jauh dari pasar, itu saja pak, coba dilihat terminal angkot di kota lain itu kan di samping pasar, jadi aktif, itu saja pak.”⁹⁷

Untuk mendapatkan keabsahan data penulis melakukan wawancara dengan penumpang atau pengguna jasa angkot yang menyatakan:

“Terminal pak, di mana terminal saja saya tidak mengetahui pak.”⁹⁸

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor penghambat dari indikator penggerak dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari seperti yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Duri Bestari ada faktor penghambat dari partisipasi sopir angkot dan juga masyarakat sebagai contoh pada wawancara penulis dengan masyarakat pengguna jasa angkot di pasar Kota Duri masih terdapat penumpang yang tidak mengetahui di mana lokasi terminal Duri Bestari ini.

⁹⁶ Wawancara terkait partisipasi pengelolaan terminal Bapak Riki Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁹⁷ Wawancara terkait partisipasi pengelolaan terminal Bapak Mansur Pada Tanggal 21 Juli 2020

⁹⁸ Wawancara terkait partisipasi pengelolaan terminal Ibuk Maria Seiregar Pada Tanggal 21 Juli 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian pada pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal di Kabupaten Bengkalis yang diukur dari Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Duri Bestari dalam pengelolaan terminal tersebut sudah cukup berjalan akan tetapi masih banyak kekurangan dalam pengelolaan terminal Duri Bestari di Kota Duri ini.

1. Hambatan yang penulis temukan seperti contoh dalam rencana kebijakan awal terminal Duri Bestari menurut beberapa pihak baik penyelenggara maupun pengguna jasa terminal menyayangkan bahwa perencanaan awal dibangun terminal itu tidak tepat sasaran dalam pemilihan lokasi sehingga banyak keluhan tentang tempat dan lokasi terminal bahkan ada sebagian pengguna jasa angkot yang tidak mengetahui lokasi terminal tersebut.
2. Komunikasi antar organisasi terdapat hambatan komunikasi antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal tentang Peraturan Bupati tentang Dinas Perhubungan dan juga tentang UPT Terminal.
3. Partisipasi sopir angkot dan masyarakat masih kurang partisipasi dari sopir angkot tersebut sebagai contoh pada saat sopir angkot atau oplet masuk ke terminal yang dimana seharusnya sopir angkot setiap masuk ke terminal harus membayar uang restribusi sebesar Rp.1000 tetapi sopir angkot meminta tunda pembayaran pada sesi masuk ke terminal selanjutnya. Terdapat beberapa

hambatan sebagai contoh ketika ada penertiban dari Dinas Perhubungan ataupun UPT Terminal, sopir angkot atau oplet yang beroperasi langsung masuk ke terminal untuk membayar uang redistribusi sebesar Rp. 1.000.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal di Kabupaten Bengkalis ada beberapa saran yang penulis rangkum seperti dibawah ini:

1. Komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan Unit Pelaksana teknis Terminal harus lebih di bangun lagi, dan juga komunikasi antar Unit Pelaksana Teknis dengan sopir angkot di Kota Duri harus lebih ditingkatkan karena terminal Duri Bestari ini yang seharusnya menaungi dan melestarikan keberadaan angkot di tengah lajunya perkembangan teknologi.
2. Terkait dengan partisipasi sopir angkot di terminal Duri Bestari ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus lebih aktif terkait dengan keluhan masyarakat dan juga sopir angkot terhadap persoalan yang dikeluhkan seperti lokasi terminal yang jauh dengan pusat keramaian seperti pasar banyak disayangkan oleh masyarakat sebagai penumpang dari angkot, dan juga yang dikeluhkan oleh sopir angkot harus memiliki solusi yang pasti misal dengan perubahan rute dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Awang, Azam. Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau; Pekanbaru,
- A.G.Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta; Bandung.
- Anselm Straus dan Juliet Corbil, 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Drs. M. Manulang, dasar-dasar Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990
- Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Public*. Gadjahmada press; Yogyakarta
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, pengantar manajemen, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009)
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- George R. Terry. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara; Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013
- Manan, Bagir.2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas UII: Yogyakarta.
- Marlok, K.E., 1995. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga
- Malayu S.P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing; Pekanbaru.

- Muhadam, Labolo, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Pt Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moekijat. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju; Bandung.
- Nasution. 2004. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. 1998. *Analisis jabatan*. Mandar Maju: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. PT. Rineka Cipta, Jakarta..
- _____. 2007. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka: Jakarta
- Nurman. 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers; Depok
- Pamudji, 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara; Jakarta
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Zanaf Publishing; Pekanbaru.
- Syafii, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Aditama, Bandung
- _____. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media. Jakarta
- Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Salim Abbas, *Manajemen Tarnsportasi* Jakarta Rajawali Press 2013
- Winandi, J. 2004, *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Jurnal / Hasil Penelitian :

Jurnal Universitas Surabaya, Oleh Defendi Dwi Indarto, dengan Judul Sistem Pengelolaan Di Terminal Purabaya (Studi Kasus Di UPTD Terminal Purabaya)

Jurnal Universitas Riau, Oleh Muhammad Rangga Sudarajat, dengan Judul Pengawasan DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016

Jurnal Universitas Diponegoro, Oleh Prasetyo Suherman, Dra Sulistyowati, Msi, Dra. Fritriyah, MA dengan Judul Sistem pengelolaan terminal mangkang kota Semarang

Kadir, Abdul, 2006. Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Wahana Hijau. Vol 1 No 3

Undang – Undang

Undang-undang Nomor.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Republik Indonesia 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Permenhub Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis